


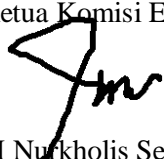
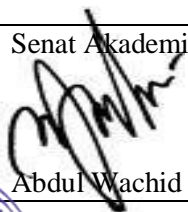
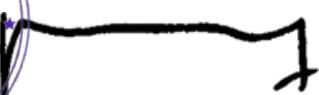
**LAPORAN TAHUNAN ETIKA AKADEMIK
PELANGGARAN MAHASISWA 2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2024**



LAPORAN TAHUNAN RETENSI MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UIN PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus
		 Muhammad Zaeni Ismail S.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Komisi Etik
		 M Nukholis Setiawan
Disetujui Oleh	:	Senat Akademik
		 Abdul Wachid BS
Ditetapkan Oleh	:	Rektor
		 Ridwan



PERINGATAN !

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu UIN Prof.K.H. Saifuddin**

Pendahuluan

Pendidikan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter, etika, dan integritas akademik mahasiswa. Universitas sebagai lembaga ilmiah memiliki tanggung jawab besar untuk menumbuhkan budaya kejujuran, disiplin, serta penghormatan terhadap aturan dan norma. Dalam konteks tersebut, pelanggaran etik mahasiswa menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga dapat mencoreng reputasi institusi dan mengganggu iklim akademik secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penyusunan laporan tahunan terkait kasus-kasus pelanggaran etik menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana universitas mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswanya.

Laporan tahunan ini secara khusus merangkum insiden-insiden pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2024, berdasarkan data yang tercatat dalam “Jadwal Rapat Rutin dan Pembahasan” di tingkat universitas. Data yang dihimpun mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pemalsuan tanda tangan, penyebaran informasi palsu, penghinaan melalui media sosial, hingga kasus plagiarisme dan pelanggaran penggunaan fasilitas digital kampus. Catatan tersebut memberikan gambaran nyata bahwa pelanggaran etik mahasiswa tidak selalu berbentuk tindakan besar, melainkan bisa muncul dari kebiasaan kecil yang diabaikan, namun berpotensi merusak tatanan nilai akademik jika dibiarkan tanpa penanganan.

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan pelanggaran, mengidentifikasi pola yang muncul sepanjang tahun, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pembinaan mahasiswa di masa depan. Evaluasi ini tidak hanya penting bagi lembaga penjaminan mutu atau unit kemahasiswaan, melainkan juga bagi seluruh sivitas akademika agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga etika bersama. Transparansi laporan ini diharapkan menjadi cermin bagi universitas dalam menilai kelemahan sekaligus peluang perbaikan sistem pengawasan dan tata tertib.

Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat luas. Dunia pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan publik, baik orang tua, calon mahasiswa, maupun mitra kerja sama universitas. Setiap insiden pelanggaran yang terjadi dan bagaimana penanganannya akan selalu menjadi indikator bagi pihak eksternal dalam menilai kredibilitas universitas. Dengan demikian, kejelasan data, kecepatan respons,

serta konsistensi pemberian sanksi atau pembinaan akan sangat menentukan citra lembaga di mata publik.

Hal lain yang perlu ditekankan adalah bahwa pendekatan dalam menangani pelanggaran tidak semata-mata menekankan aspek hukuman, melainkan juga aspek edukasi dan pembinaan. Mahasiswa merupakan individu dalam proses pencarian jati diri; kesalahan yang mereka lakukan dapat menjadi titik balik untuk belajar jika ditangani dengan bijaksana. Oleh karena itu, universitas perlu mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi. Kesalahan yang tergolong ringan sebaiknya dijadikan momentum pembinaan melalui konseling atau mediasi, sementara kesalahan serius yang mengancam integritas akademik perlu ditindak dengan tegas agar tidak menjadi preseden buruk.

Akhirnya, laporan tahunan ini diharapkan bukan hanya menjadi dokumen administratif yang sekadar menyimpan catatan pelanggaran, tetapi juga menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan untuk langkah-langkah strategis di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi terukur dan rekomendasi yang tepat, universitas diharapkan dapat memperkuat budaya akademik yang sehat, menekan jumlah pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran etis seluruh mahasiswa. Budaya akademik yang berintegritas pada akhirnya akan menjadi modal utama dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Baik, saya buat analisis dan penutup yang masing-masing sekitar 500 kata agar seimbang dengan pendahuluan.

Analisis

Sepanjang tahun 2024, data yang dihimpun melalui catatan rapat rutin dan pembahasan fakultas/universitas menunjukkan beragam bentuk pelanggaran etik mahasiswa. Dari jumlah insiden yang tercatat, terlihat adanya pola-pola tertentu yang mencerminkan dinamika kehidupan kampus sekaligus tantangan besar bagi manajemen universitas dalam menjaga disiplin dan integritas akademik. Analisis terhadap data tersebut perlu dilakukan secara mendalam agar dapat ditemukan benang merah antara jenis pelanggaran, frekuensi, waktu kejadian, serta efektivitas penanganan.

Pertama, analisis distribusi bulanan memperlihatkan bahwa kasus pelanggaran cenderung meningkat pada periode akhir tahun akademik, khususnya di bulan Desember. Hal ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya tekanan akademik berupa ujian, deadline tugas akhir, maupun administrasi beasiswa. Kondisi tersebut mendorong sebagian mahasiswa mengambil jalan pintas yang melanggar

aturan, seperti pemalsuan tanda tangan atau penyebaran hoaks untuk menghindari kewajiban akademik. Fakta ini menegaskan bahwa universitas perlu memberikan dukungan psikologis dan akademik lebih besar menjelang periode krusial agar mahasiswa tidak terdorong melakukan pelanggaran.

Kedua, kasus yang terkait dengan media sosial dan komunikasi digital muncul berulang kali sepanjang tahun. Ujaran tidak pantas, hingga penyebaran informasi palsu via *WhatsApp* atau platform daring lain menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan etika bermedia. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi, namun tanpa disertai kesadaran penuh akan konsekuensi hukum maupun etika. Universitas memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan literasi digital, termasuk melalui seminar, mata kuliah terkait, atau penyusunan panduan penggunaan media sosial yang etis bagi mahasiswa.

Ketiga, beberapa kasus berhubungan dengan pelanggaran administratif seperti pengabaian prosedur kehadiran, penggunaan fasilitas tanpa izin, serta penyalahgunaan surat rekomendasi. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam sosialisasi aturan kampus dan lemahnya pengawasan internal. Sering kali mahasiswa beralasan tidak memahami prosedur atau menganggap aturan sebagai formalitas semata. Dari perspektif ini, evaluasi terhadap metode sosialisasi dan pengawasan menjadi penting, termasuk pemanfaatan sistem informasi akademik berbasis digital yang lebih transparan dan terintegrasi.

Keempat, kasus plagiarisme dan kecurangan akademik menegaskan pentingnya penanaman budaya kejujuran ilmiah. Walaupun jumlah kasus tidak banyak, isu ini sangat sensitif karena menyangkut kredibilitas akademik universitas. Penanganan yang hanya berupa perbaikan kutipan memang dapat memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa, namun perlu juga pendekatan preventif yang lebih sistematis, misalnya dengan penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme, penyusunan modul etika penulisan, serta pendampingan intensif bagi mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah.

Dari sisi penanganan, universitas tampak konsisten memberikan sanksi dan pembinaan, meskipun variasi hukuman masih cukup beragam. Sebagian kasus ditangani dengan teguran dan mediasi, sementara kasus serius mendapat skorsing atau pencabutan beasiswa. Pendekatan proporsional ini sebenarnya sudah baik karena tidak semua pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang sama. Namun, kelemahan yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam penjatuhan sanksi agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan mahasiswa. Transparansi keputusan dan publikasi prosedur penanganan kasus akan sangat membantu memperkuat legitimasi kebijakan universitas.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa pelanggaran etik mahasiswa merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi faktor akademik, psikologis, sosial, dan kelemahan sistem tata kelola. Universitas tidak bisa hanya menekankan hukuman, tetapi harus membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Literasi digital, dukungan psikologis, pengawasan akademik, serta transparansi tata kelola menjadi pilar penting agar jumlah pelanggaran dapat ditekan di masa mendatang.

Ringkasan Statistik & Analisis

Bulan Periode	Jumlah Kasus	Jenis Pelanggaran	Rata-rata Waktu Penanganan	Catatan Khusus
Januari	1	sedang	< 1 bulan	Teguran
Februari	1	sedang	< 1 bulan	Peringatan tertulis
Maret	1	berat	< 1 bulan	Konten dihapus
April	1	sedang	< 1 bulan	Teguran langsung
Mei	1	sedang	< 1 bulan	Penghapusan konten
Juli	1	berat	< 1 bulan	Peringatan
Agustus	2	sedang	< 1 bulan	Peringatan
September	1	berat	< 1 bulan	Teguran tertulis

Oktober	1	sedang	< 1 bulan	Peringatan
November	1	sedang	< 1 bulan	Teguran
Desember	3	berat	< 1 bulan	Peringatan & pembinaan

Analisis Pola

1. Peningkatan insiden menjelang akhir tahun, terutama di bulan Desember.
2. Media sosial & komunikasi digital menjadi titik rawan.
3. Banyak pelanggaran administratif & prosedural.
4. Respon kampus cukup cepat & konsisten.
5. Pendekatan pembinaan lebih dominan daripada hukuman.

Rekomendasi Perbaikan & Strategi Ke Depan

1. Sosialisasi etik & tata tertib secara berkala.
2. Fokus pengawasan pada periode akhir semester.
3. Penguatan sistem IT & akses digital.
4. Proses mediasi & pembinaan lebih proaktif.
5. Evaluasi berkala & *feedback loop*.
6. Visualisasi data & publikasi transparansi.

Penutup

Laporan tahunan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pelanggaran etik mahasiswa di lingkungan universitas selama tahun 2024. Dari catatan yang terkumpul, terlihat bahwa kasus-kasus yang muncul tidak hanya menyangkut aspek akademik semata, tetapi juga perilaku sosial, komunikasi digital, serta kepatuhan terhadap prosedur administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak dapat dipandang hanya dari sisi transfer ilmu, melainkan juga pembentukan karakter dan integritas pribadi setiap mahasiswa.

Penanganan kasus-kasus yang dilakukan universitas pada umumnya sudah menunjukkan komitmen terhadap tegaknya aturan, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam hal konsistensi dan transparansi. Pemberian sanksi yang beragam, mulai dari teguran, klarifikasi, hingga skorsing, menunjukkan adanya upaya menyesuaikan hukuman dengan tingkat keseriusan

pelanggaran. Namun, hal tersebut perlu dilengkapi dengan komunikasi yang jelas kepada mahasiswa agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih atau ketidakadilan.

Selain aspek penindakan, universitas juga perlu menekankan strategi pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi aturan, penyelenggaraan seminar atau lokakarya etika akademik, serta penguatan sistem informasi yang mendukung transparansi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya tahu aturan secara formal, tetapi juga memahami alasan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pencegahan yang berbasis edukasi akan jauh lebih efektif daripada sekadar menunggu terjadinya pelanggaran untuk kemudian dijatuhi sanksi.

Ke depan, universitas diharapkan dapat memperkuat budaya integritas dengan melibatkan seluruh unsur civitas akademika. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa perlu sama-sama membangun kesadaran bahwa integritas adalah fondasi utama keberhasilan akademik dan reputasi institusi. Budaya ini hanya bisa tumbuh jika semua pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaganya.

Laporan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa pelanggaran etik mahasiswa bukanlah kegagalan individu semata, melainkan cermin dari sistem pendidikan yang masih perlu diperbaiki. Setiap kasus dapat dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan pengawasan, serta mengembangkan program pembinaan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, universitas dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat, produktif, dan berintegritas.

Akhirnya, laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting bagi perumusan strategi universitas dalam membangun tata kelola kemahasiswaan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan kombinasi antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan kepedulian dalam membina mahasiswa, universitas akan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga kokoh dalam integritas moral. Harapan besar kita adalah bahwa tahun-tahun berikutnya akan menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran etik, seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai nilai luhur pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, penanganan kasus pelanggaran etik mahasiswa di tahun 2024 menunjukkan respons yang cepat dan sistematis. Meski ada ruang perbaikan, dengan strategi yang tepat, diharapkan jumlah pelanggaran menurun dan kesadaran mahasiswa meningkat di masa mendatang.

